

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sampai saat ini masih merupakan topik penting yang terus menerus diperbincangkan. Suatu negara atau daerah-daerah akan terus berupaya untuk memperbaiki pembangunan ekonominya, maka dari itu pembangunan ekonomi menjadi program pemerintah setiap tahunnya. Melalui rencana-rencana yang dituangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).

Pembangunan ekonomi menurut Meier (1995), adalah suatu proses adanya peningkatan pendapatan perkapita suatu negara selama kurun waktu yang panjang. Begitupun halnya yang dijelaskan Todaro (2000), pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses terencana yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja namun merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial atau menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dari aspek materi (Kuncoro, 2006).

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya (Nugraha dan Maruto, 2007). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu target dalam proses pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pada pertumbuhan ekonominya. Jika

pertumbuhan ekonomi meningkat pada setiap tahunnya, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi pun meningkat (Dhyatmika, 2013).

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut menekankan pada suatu gambaran dalam waktu yang cukup lama dengan tidak hanya melihat kenaikan dari pendapatan nasional namun juga mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk. Jadi, selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, salah satu tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi juga perlu adanya peningkatan standar hidup masyarakat (Boediono, 1999, dalam Nisa, 2014).

Arsyad (2002) mengatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah satu tidak akan sama dengan daerah yang lainnya walaupun dalam satu Provinsi.

Kaum klasik berpandangan bahwa daerah yang memiliki atau kaya SDA (Sumber Daya Alam) akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin Sumber Daya Alam (Emilia, 2006). Perbedaan Sumber Daya Alam tersebut merupakan modal awal dalam pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain mengandalkan Sumber Daya Alam yang ada dibutuhkan juga sinergi dengan faktor-faktor lain seperti Sumber Daya Manusia yang mengelola Sumber Daya Alam, teknologi sebagai alat "*tools*" untuk mengelola Sumber Daya Alam. Sehingga akan dihasilkan barang dan jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya berdampak pada pendapatan daerah

tersebut. Seketika terjadi *multiplier effect* dalam kegiatan perekonomian dan perputaran uang akan terjadi (Nugraha, 2013).

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Otonomi daerah ditandai dengan lahirnya dua produk undang-undang, yaitu UU. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan atau revisi pada tahun 2004, dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Setelah itu,

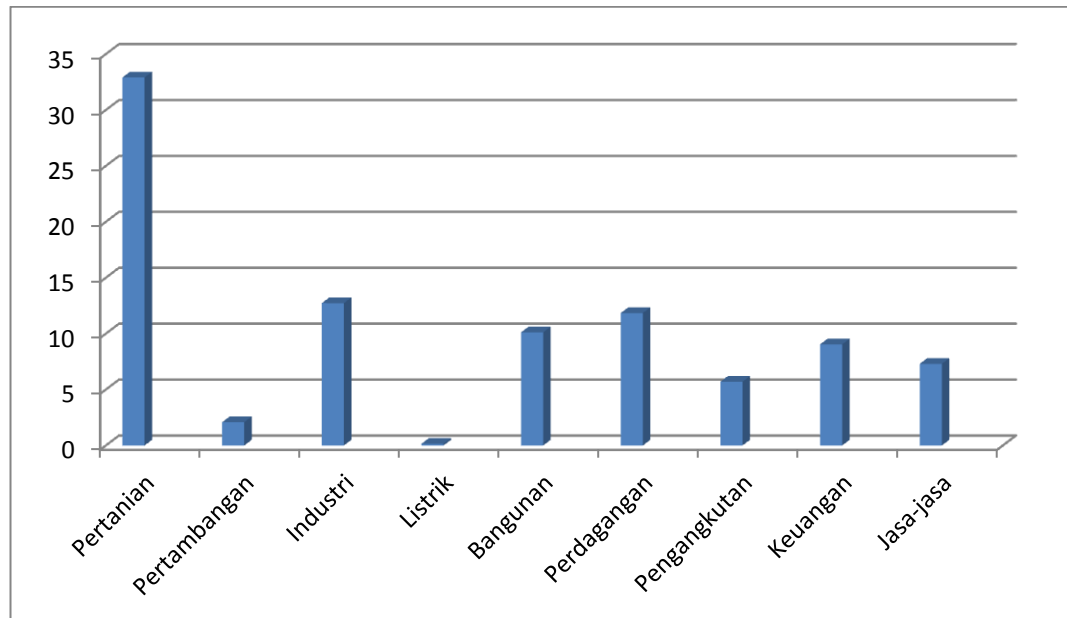
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami revisi kembali yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Lahirnya undang-undang tersebut disambut positif oleh banyak kalangan dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian suatu daerah sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi di daerah yang telah dilaksanakan maupun dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang (Sapta, 2007)

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut (Nugraha, 2013).

Sehingga, pembangunan ekonomi suatu daerah harus saling melengkapi antara tiga nilai pokok tersebut dengan pembangunan moral dari sisi agama. Sebab, masyarakat adalah sebagai Sumber Daya yang berperan penting dalam berkembangnya perekonomian daerah, jika ketiga nilai pokok yang diutarakan oleh Todaro tersebut telah terpenuhi maka attitude (perilaku) yaitu perbaikan moral dan agama sebagai pondasinya.

Gambar 1.1 Peranan Sektor-sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014



Sumber :PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Nganjuk 2014(diolah)

Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang memiliki potensi alam yang cukup baik dan sangat berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terbukti dari peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB. Gambar 1.1 menjelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 32,91% terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Kemudian disusul oleh sektor industri dan pengolahan yaitu sebesar 12,73 % selanjutnya yang berada di posisi ke tiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 11,84 %. Sektor yang paling rendah dalam kontribusinya adalah sektor pengadaan listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0,15 %.

Tabel 1.1 PDRB dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

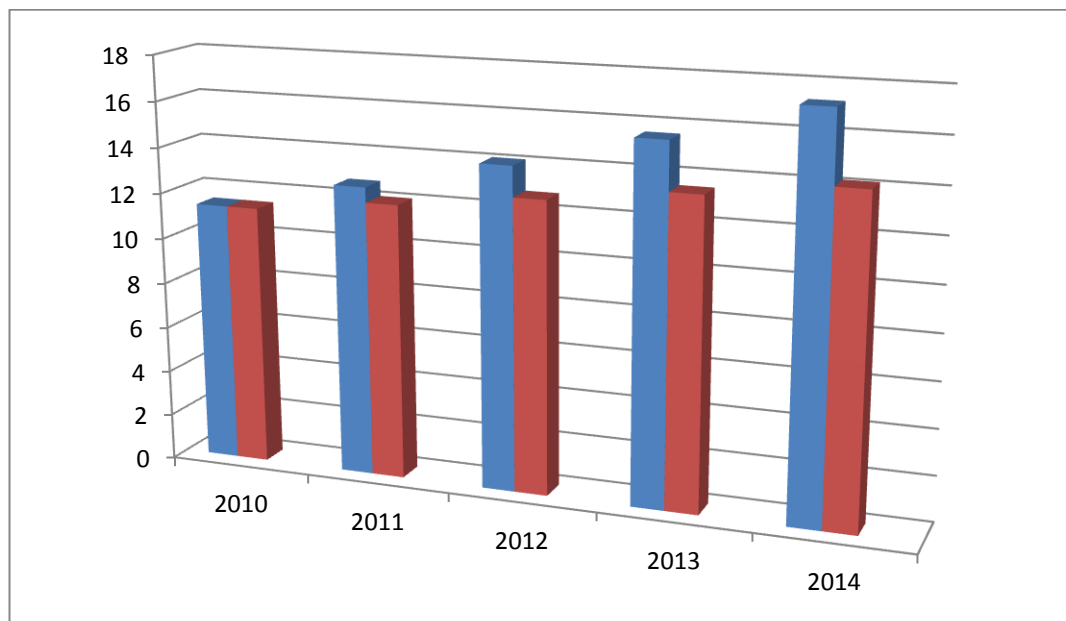
U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (000 000 Rp)	11.405.446,29	12.714.458,54	14.087.527,45	15.572.244,26	17.259.839,30
2. Penyusutan (000 000 Rp)	1.249.217,28	1.416.379,15	1.557.415,37	1.726.086,43	1.919.439,77
3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) (000 000 Rp)	10.156.229,01	11.298.079,39	12.530.112,08	13.846.157,82	15.340.399,54
4. Pajak Tak Langsung Netto (000 000 Rp)	1.425.680,79	1.665.594,07	1.975.071,35	2.312.478,27	2.597.605,81
5. Produk Domestik Regional Netto Adh. Faktor Produksi/Pendapatan Regional	8.730.548,22	9.632.485,32	10.555.040,73	11.533.679,55	12.742.793,72
6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	11.221.492,36	12.431.614,45	13.738.353,46	15.128.495,23	16.698.809,40
7. Produk Domestik Regional Netto Per Kapita (Rupiah) (Pendapatan Perkapita)	8.589.736,67	9.418.202,38	10.293.423,09	11.205.014,08	12.328.590,08
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (000 000 Rp)	11.405.446,29	12.061.173,87	12.766.977,51	13.473.777,66	14.161.523,92
2. Penyusutan (000 000 Rp)	1.249.217,28	1.343.603,83	1.411.424,90	1.493.484,46	1.574.880,95
3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) (000 000 Rp)	10.156.229,01	10.717.570,04	11.355.552,61	11.980.293,20	12.586.642,97
4. Pajak Tak Langsung Netto (000 000 Rp)	1.425.680,79	1.580.013,78	1.789.930,25	2.000.855,98	2.131.309,35
5. Produk Domestik Regional Netto Adh. Faktor Produksi/Pendapatan Regional	8.730.548,22	9.137.556,27	9.565.622,36	9.979.437,22	10.455.333,62
6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	11.221.492,36	11.792.862,66	12.450.534,72	13.089.826,86	13.701.204,56
7. Produk Domestik Regional Netto Per Kapita (Rupiah) (Pendapatan Perkapita)	8.589.736,67	8.934.283,45	9.328.528,48	9.695.061,67	10.115.483,71
III. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN					
	1.016.393	1.022.752	1.025.416	1.029.332	1.033.597
*) ANGKA SEMENTARA					

Sumber :PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nganjuk tahun 2015

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan produktivitas secara nyata juga terlihat pada Kabupaten Nganjuk dari tahun 2010 hingga tahun 2014, nilai tambah atas dasar harga berlaku yang diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi pada tahun 2014 sebesar Rp17.259.839.300.000. Dengan pendapatan per kapita sebesar

Rp12.328.590.080.000 PDRB atas harga berlaku bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar Rp15.572.244.260.000 ada kenaikan sebesar 10,83 %, sedangkan untuk pendapatan per kapita tahun 2013 sebesar Rp11.205.014.080.000 atau terjadi kenaikan sebesar 10,03 % di tahun 2014.

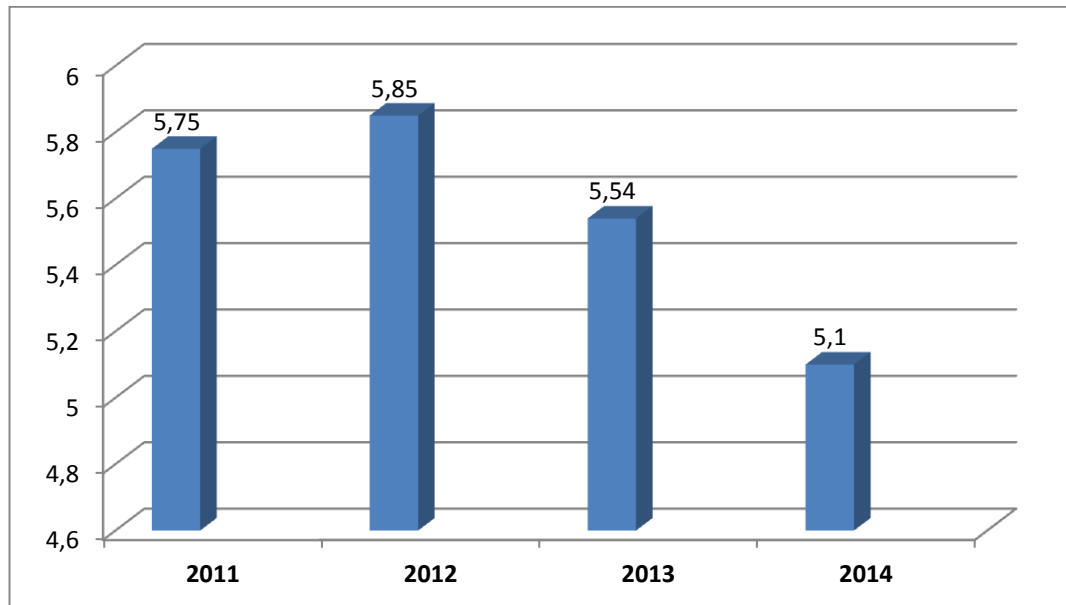
Gambar 1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2014 (triliun rupiah)



Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2015

Gambar 1.2 menjelaskan tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk dari 5 tahun terakhir, dari gambar tersebut terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto baik atas harga berlaku maupun harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Kenaikan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 dimana Produk Domestik Regional Bruto baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan masing-masing ±17 triliun dan 14 triliun rupiah, selama 5 tahun terakhir terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2010 baik atas harga berlaku maupun harga konstan sebesar ±11 triliun rupiah.

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2011-2014 (dalam persen)



Sumber :Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2015(diolah)

Walaupun demikian, besarnya laju pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Dalam Gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,75% kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 5,85% namun setelah itu pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,54% dan pada tahun 2014 menurun kembali secara signifikan menjadi 5,1%. Penurunan tersebut cukup signifikan yaitu sebesar 0,31% dari tahun 2012 menuju tahun 2013, kemudian penurunan sebesar 0,44 % dari tahun 2013 menuju tahun 2014. Jika dihitung dari tahun 2012 menuju tahun 2014 penurunannya sangat drastis yaitu sebesar 0,75%.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2011-2014 (dalam persen)

No.	Sektor	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian,kehutanan,perikanan	3,53	3,87	1,23	2,4
2	Pertambangan dan penggalian	5,48	3,67	3,57	4,94
3	Industri pengolahan	4,7	4,3	5,73	5,19
4	Pengadaan listrik dan gas	11,44	9,51	6,86	4,24
5	Bangunan	5,95	6,25	7,48	6,72
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,44	17,49	19,01	15,2
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,92	16,4	18,3	15,61
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	27,32	22,86	27,33	22,26
9	Jasa-jasa	25,72	18,91	21,21	19,46
Total	PDRB(Produk Domestik Bruto)	5,75	5,85	5,54	5,1

Sumber:PDRB Kabupaten Nganjuk 2015

Dari tabel 1.2 dapat diketahui sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan laju pertumbuhannya fluktuatif, mengalami naik turun dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 2,4% di tahun 2014, demikian juga dengan sektor-sektor yang lain. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2014 sebesar 5,1 %, melambat dibanding tahun 2013 yang mencapai 5,54 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 22,26%. Disusul lapangan usaha Jasa-jasa sebesar 19,46% dan pengangkutan sebesar 15,61%. Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan dalam rentang 5% ialah lapangan usaha industri dan pengolahan sebesar 5,19% dan sektor bangunan sebesar 6,72% pada tahun 2014.

Kegiatan basis (sektor unggulan) memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak pertama yang akan berdampak pada setiap perubahan pendapatan sektor tersebut serta memberikan efek pengganda terhadap perekonomian agregat daerah, semakin banyak sektor yang unggul pada suatu daerah akan

menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya dan meningkatkan nilai investasi serta menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis (Maryunani, 2007).

Harry W. Richardson (1973) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 1999). Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku yang dapat di ekspor, maka akan menghasilkan kekayaan lokal atau daerah serta menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Pentingnya mengetahui sektor unggulan ini sesuai dengan teori basis ekonomi yang dikembangkan oleh Tiebout yang membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Menurut Richardson (1977) bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis, begitupula sebaliknya.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga

dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018 sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk adalah sektor perdagangan, sektor industri dan sektor jasa-jasa, meskipun sektor pertanian secara pertumbuhannya menurun namun sektor pertanian tetap menjadi sektor yang unggul. Di dalam visi RPJMD disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk ingin mewujudkan kejayaan Nganjuk dengan berlandaskan iman dan taqwa, dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian untuk keadilan dan kesejahteraan. Hal ini berarti sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama untuk dikembangkan di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan trend yang semakin meningkat namun laju pertumbuhan cenderung menurun apakah mempengaruhi penentuan sektor unggulan di Kabupaten Nganjuk artinya masih sesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk. Dari hal tersebut maka perlu ditinjau ulang apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pentingnya mengetahui sektor unggulan di suatu daerah serta kaitannya dengan sektor unggulan yang ditentukan oleh RPJMD Kabupaten Nganjuk, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sebenarnya apa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan dengan mengetahui sektor apa yang unggul dan memiliki potensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, maka sektor tersebut mampu mendorong sektor-sektor lain yang masih ada dibawahnya agar akhirnya dapat progres atau berkembang

jauh lebih baik. Dengan demikian penulis mengangkat judul tentang **“Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan, serta kesesuaiannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan serta kesesuaiannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membuat rencana kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan sektor potensial yang dimiliki.
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang kinerja masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran atau kebijakan kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.